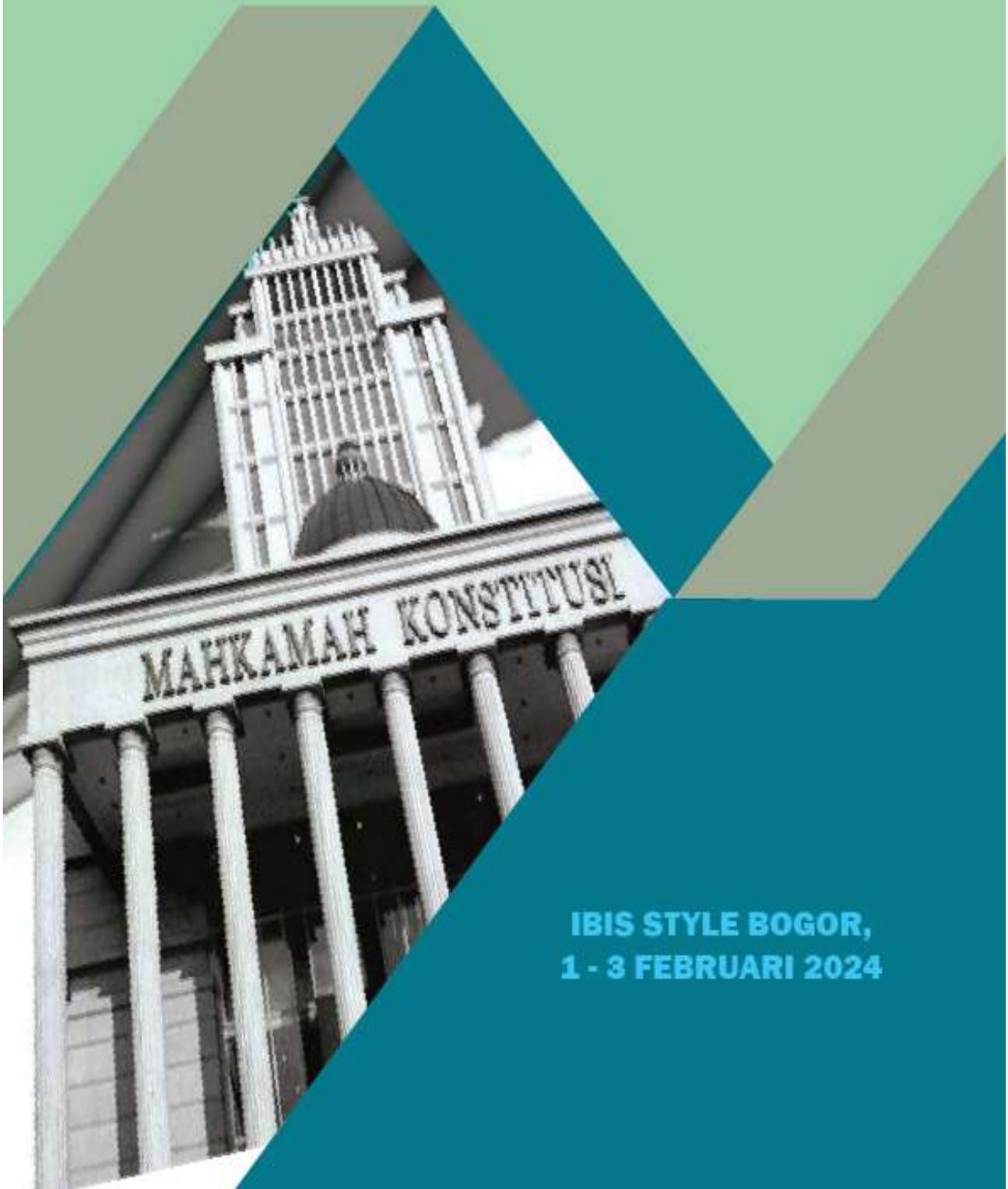


LAPORAN KEGIATAN
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
MAHKAMAH KONSTITUSI TA 2023 (UNAUDITED)
DAN PENYUSUNAN APLIKASI SIVIKA
DAN E-KINERJA (LAKIP)



IBIS STYLE BOGOR,
1 - 3 FEBRUARI 2024

**Laporan Kegiatan Rapat Penyusunan
Laporan Keuangan MK TA 2023
(*Unaudited*) dan Penyusunan Aplikasi
SIVIKA dan e-Kinerja (LAKIP)**



**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
BOGOR, 1-3 FEBRUARI 2024**

LAPORAN KEGIATAN RAPAT PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MK TA 2023 (UNAUDITED) DAN PENYUSUNAN APLIKASI SIVIKA DAN E-KINERJA (LAKIP)

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Membahas secara umum mengenai permasalahan yang dihadapi ketika menyusun Laporan Keuangan MK TA 2023 (*Unaudited*) serta menemukan solusinya melalui diskusi intens dengan para narasumber, membahas penyusunan terkait aplikasi SIVIKA dan e-Kinerja (LAKIP).

2. Maksud dan Tujuan

Penyempurnaan Laporan Keuangan MK TA 2023 (*Unaudited*) yang memenuhi standar dan kebijakan akuntansi pemerintah serta pembaharuan sistem aplikasi SIVIKA dan e-Kinerja (LAKIP) agar berdayaguna bagi seluruh *Stakeholder*.

3. Dasar

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-31/PB/PB.6/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2023 (*Unaudited*).

B. KEGIATAN/TUGAS YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Mk TA 2023 (*Unaudited*) dan Penyusunan Aplikasi Sivika dan e-Kinerja (LAKIP) dilaksanakan pada hari Kamis s.d. Sabtu, tanggal 1 s.d. 3 Februari 2024 di Hotel Ibis Style Bogor Raya, Bogor, Jawa Barat, dengan narasumber sebagai berikut :

No.	Nama	Instansi	Jabatan
1.	M. Syihabudin	KPKNL Jakarta IV	Kepala Seksi
2.	Himawan Ardhy	KPKNL Jakarta IV	Pelaksana
3.	Arya Pratama	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)	Pelaksana
4.	Erwin Eka Septya Budi	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK)	Fungsional Umum
5.	Lutfi Nasrullah	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK)	Fungsional Umum

Serta dihadiri peserta dari Mahkamah Konstitusi, yaitu :

NO	NAMA	JABATAN
1	Heru Setiawan	Sekretaris Jenderal
2	Tatang Garjito	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
3	Elisabeth	Kepala Biro Umum
4	Kurniasih Panti Rahayu	Inspektur
5	Sigit Purnomo	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
6	Endrizal	Kepala Bagian Keuangan
7	Isti Widayanti	Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi
8	Syarief Hidayatullah Az Zaky	Kepala Bagian Pengadaan dan Penatausahaan BMN
9	Mundiri	Kepala Bidang Sistem Informasi dan Layanan Data
10	Yuni Nurhayati	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia
11	Budi Hari Wibowo	Kepala Bagian Umum
12	Akbar Anatajaya	Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
13	Sylvia Yuliani	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan
14	Romi Sundara	Kepala Sub Bagian Hukum
15	Kin Isura Ginting	Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Laporan BMN
16	Mastiur Afrilidiany Pasaribu	Kepala Sub Bagian Penatausahaan BMN
17	Melati Kusuma Wardani	Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran
18	Mohammad Arief	Kepala Sub Bagian Administrasi Hakim dan Pegawai

NO	NAMA	JABATAN
19	Maria Ulfah Kusumaastuti	Kepala Sub Bagian Tata Usaha PUTIK
20	Eliza	Kepala Sub Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi
21	Tania Nitrina Nanda Lawi	Pranata Keuangan APBN Penyelia
22	Allita Prisantama	Analisis Keuangan APBN Ahli Pertama
23	Andi Aprilla Megananda S.	Bendahara Pengeluaran Pembantu I
24	Dessy Citrawaty Mursito	Bendahara Pengeluaran Pembantu II
25	Nurdani Hidayati	Bendahara Penerimaan
26	Irvan Afrialdi Awaludin M.	Pranata Keuangan APBN Penyelia
27	Sarah	Pranata Keuangan APBN Penyelia
28	Renando Piany Fazardo	Analisis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan
29	Nur Hasanah	Pranata Keuangan APBN Penyelia
30	Rucy Susanto	Pranata Keuangan APBN Penyelia
31	Viona Trijaya Br Hutasoit	Pengolah Data dan Informasi
32	Yati Suryati	Pengolah Data dan Informasi
33	Putri Sukmawati	Pengolah Data dan Informasi
34	Santi Widiastuti	Pranata Keuangan APBN Penyelia
35	Aris Wahyu Hajianto	Analisis Rencana Program dan Kegiatan
36	Khurin'in Kurnia Putri	Analisis Rencana Program dan Kegiatan
37	Windu Budiyanto	Analisis Rencana Program dan Kegiatan
38	Chandra Okantara	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
39	William Ivan Nathanael Pangabea	Pengolah Data dan Informasi
40	Ade Sudrajat	Pengelola Barang Persediaan
41	Afrianto Amri	Pranata Keuangan APBN Terampil
42	Achmad Junaedi	Pengelola BMN
43	Puspita Linda Laras Priska	Pengelola BMN
44	Fernanda Winahyu Amarani	Pengolah Data dan Informasi

NO	NAMA	JABATAN
45	Bambang Sugito	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas
46	Ghina Sausan Fadiyah	Pengolah Data dan Informasi
47	Edo Dwi Mahadiputra	Pengolah Data dan Informasi
48	M. Hery Prasetyo Wahyu J.	Pengolah Data dan Informasi
49	Dewi Fitriyani	Pustakawan Ahli Muda
50	Tiara Agustina	Pengelola Media <i>Center</i> dan Kemitraan Media
51	Edwin Rivano	Pengelola Asrama
52	Puspa Wijayanti	Apoteker
53	Muhammad Halim	Analisis Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum
54	Sri Haryanti	Pranata Komputer Ahli Muda
55	Rachman Karim	Pranata Komputer Ahli Pertama
56	Bayu Wicaksono	Tim Publikasi

C. HASIL YANG DICAPAI

Kegiatan ini menghasilkan solusi-solusi terhadap permasalahan yang dihadapi saat penyusunan Laporan Keuangan MK TA 2023 (*Unaudited*) serta penyelesaian masalah terkait pengembangan (*Up-Grade*) sistem aplikasi SIVIKA dan E-KINERJA (LAKIP) agar memenuhi kebutuhan *stakeholder* secara keseluruhan.

D. KESIMPULAN

Garis besar permasalahan yang menjadi diskusi dalam penyusunan Laporan Keuangan MK TA 2023 (*Unaudited*) serta solusi terkait masalah tersebut yaitu :

1. Gedung III MK:

- a) Gedung dan Bangunan atas MK III statusnya adalah penggunaan sementara dengan Setneg. Segala transaksi terkait dengan renovasi Gedung III harus menggunakan Belanja Modal Lainnya, dikarenakan Gedung III merupakan Aset milik Setneg (Aset Tetap Renovasi). Pada Tahun Anggaran 2023 masih terdapat realisasi belanja atas renovasi Gedung III yang masih

menggunakan Belanja Gedung dan Bangunan. Untuk kedepannya agar diperhatikan supaya tidak terdapat kesalahan penggunaan akun;

- b) Serah terima/alih status Peralatan dan Mesin dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024, namun pada Tahun 2023 telah terdapat Berita Acara Cek Fisik;
- c) Penjelasan terkait hal-hal tersebut agar di *disclosure* pada Catatan atas Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan BMN.

- 2. APIP telah menyampaikan hasil reviu atas Laporan Keuangan TA 2023 (*Unaudited*). Dari beberapa hasil reviu, ada beberapa yang di *drop* dan ada beberapa yang akan ditindaklanjuti oleh Biro Renkeu dan Biro Umum.
- 3. Terkait lelang, hibah dan kehilangan BMN pada Universitas Papua yang telah dilaksanakan dan sudah dibayarkan seharusnya dilakukan penghapusan tidak hanya penghentian. Syarat penghapusan adalah dengan adanya SK Penghapusan. Sampai saat ini SK Penghapusan masih belum terbit. Tindaklanjutnya adalah SK Penghapusan akan diterbitkan dengan nomor mundur untuk:

- SK Penghapusan Hibah tanggal 14 Desember 2023;
- SK Penghapusan Lelang Vicon tanggal 29 Desember 2023;
- SK Penghapusan TGR Papua tanggal 29 Desember 2023;
- SK Penghapusan Chiller tanggal 15 Desember 2023;
- SK Penghapusan Mobil tanggal 1 November 2023.

Setelah SK Penghapusan terbit, maka akan dilakukan penghapusan pada aplikasi SAKTI sehingga nilai BMN yang telah hilang, rusak atau dihibahkan tidak muncul pada Neraca. Pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 SK sudah harus di penyusun Laporan BMN agar bisa segera ditindaklanjuti.

- 4. Penyusun Laporan Keuangan dan penyusun Laporan BMN telah menindaklanjuti hasil reviu APIP. Namun terkait penghapusan BMN akan ditindaklanjuti hari Senin. Selanjutnya akan dilaksanakan rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN.
- 5. Agar nilai IKPA baik, maka Laporan BMN harus dikumpulkan paling lambat H-4 dari *deadline* yang telah ditetapkan. Deadline yang telah ditetapkan adalah tanggal 16 Februari 2024.

6. Target penyampaian Laporan Keuangan TA 2023 (Unaudited) ke Kementerian Keuangan adalah tanggal 14 Februari 2024 dimana deadline yang telah ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah tanggal 16 Februari 2024.

7. Pengembangan Aplikasi SIVIKA:

- a) Memperbaiki tampilan Aplikasi agar lebih menarik dan *user friendly*;
- b) Tambahkan pemberian akses sebagai *User* bagi pegawai selain Pengelola Keuangan, yaitu:
 - Seluruh Pejabat Struktural sampai dengan Pejabat Eselon IV;
 - Sekretaris Ketua MK dan Sekretaris Wakil Ketua MK;
 - Sekretaris Sekjen dan Sekretaris Panitera.

Fitur yang dapat diakses yaitu :

- Rencana Aksi (akses bisa melihat rencana aksi untuk periode bulanan dan tahunan dari masing-masing unit kerja);
 - Rencana Penarikan Dana (akses melihat rencana penarikan dana untuk periode bulanan dan tahunan dari masing-masing unit kerja);
 - Monitoring Realisasi Anggaran (akses bisa melihat tayangan realisasi anggaran sampai tingkat Sub Komponen tanpa akses membuka detail bukti pembayaran).
- c) Perubahan proses bisnis untuk pembayaran Kuitansi/SPBy yang mengakibatkan perubahan alur pada SIVIKA:
- Dokumen kuitansi/SPBy dari PPK diterima Kepala Bagian Keuangan selaku Penerima kuitansi/SPBy, diteruskan ke Bendahara Pengeluaran, didistribusi ke masing-masing BPP untuk proses pembayaran (Pembayaran dapat dilakukan apabila PPK sudah menyerahkan dokumen fisik ke BPP);
 - Perubahan tersebut mengakibatkan perubahan alur/ proses di SIVIKA untuk Dokumen Pembayaran SPBy menjadi sebagai berikut :



d) Proses bisnis untuk pembayaran/pencairan SPP LS, SPP GUP, SPP PTUP menggunakan proses yang sudah berjalan, yaitu dari PPK diserahkan ke Penerima Kuitansi (Kepala Bagian

Keuangan) untuk diverifikasi oleh Verifikatur disetujui oleh Kepala Sub Bagian Verifikasi dan diproses SPM sehingga tidak ada perubahan alur di SIVIKA.

e) Selanjutnya, Biro Renkeu akan menindaklanjuti melalui:

- Menyusun konsep perubahan SOP tentang Pembayaran Kuitansi/SPBy melalui Bendahara;
- Menyampaikan Nota Dinas kepada Bapak Sekretaris Jenderal perihal Permohonan Perubahan Proses Pembayaran Kuitansi/SPBy dalam Aplikasi SIVIKA.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas Kegiatan Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Mk TA 2023 (*Unaudited*) dan Penyusunan Aplikasi Sivika Dan e-Kinerja (LAKIP).

Jakarta, 12 Februari 2024

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Tatang Garjito

LAMPIRAN

1. Surat Undangan Narasumber



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 143/KU.07/01/2024 25 Januari 2024
Hal : Undangan Narasumber

Kepada Yth.
Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Up. Tim Pembina MKRI

di Jakarta

Dengan hormat bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka Kegiatan Rapat Konsinyering Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi TA 2023 (*Unaudited*), kami mohon kesediaan Bapak untuk berkenan menghadiri dan/atau menugaskan pejabat/pegawai yang berkompeten sebagai narasumber dalam kegiatan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis s.d. Sabtu / 1 s.d. 3 Februari 2024
Agenda : susunan acara terlampir
Tempat : Hotel Ibis Style Bogor Raya
Jl. Golf Estate Bogor Raya, Sukaraja
Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16710
Pakaian : Kamis menggunakan Batik
Jumat dan Sabtu menggunakan pakaian Bebas Rapih

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

**Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan**



Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP:196906091993031001
Digital Signature
mk288162190240125115122

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177
Email: Office@mkri.id



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 142/KU.07/01/2024
Hal : Undangan Narasumber

25 Januari 2024

Kepada Yth.
Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kementerian Keuangan RI
di Jakarta

Dengan hormat bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka Kegiatan Rapat Konsinyering Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi TA 2023 (*Unaudited*), kami mohon kesediaan Bapak untuk berkenan menghadiri dan/atau menugaskan pejabat/pegawai yang berkompeten sebagai narasumber dalam kegiatan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis s.d. Sabtu / 1 s.d. 3 Februari 2024
Agenda : susunan acara terlampir
Tempat : Hotel Ibis Style Bogor Raya
Jl. Golf Estate Bogor Raya, Sukaraja
Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16710
Pakaian : Kamis menggunakan Batik
Jumat dan Sabtu menggunakan pakaian Bebas Rapih

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan



Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP:196906091993031001
Digital Signature
mk-702826512240125115114

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 141/KU.07/01/2024
Hal : Undangan Narasumber

25 Januari 2024

Kepada Yth.
Kepala KPKNL Jakarta IV
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kementerian Keuangan RI
di Jakarta

Dengan hormat bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka Kegiatan Rapat Konsinyering Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi TA 2023 (*Unaudited*), kami mohon kesediaan Bapak untuk berkenan menghadiri dan/atau menugaskan pejabat/pegawai yang berkompeten sebagai narasumber dalam kegiatan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis s.d. Sabtu / 1 s.d. 3 Februari 2024
Agenda : susunan acara terlampir
Tempat : Hotel Ibis Style Bogor Raya
Jl. Golf Estate Bogor Raya, Sukaraja
Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16710
Pakaian : Kamis menggunakan Batik
Jumat dan Sabtu menggunakan pakaian Bebas Rapih

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan



Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP:196906091993031001
Digital Signature
mk163524654240125115104

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177
Email: Office@mkri.id

2. Surat Undangan Peserta



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 144/KU.07/01/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan

25 Januari 2024

Kepada Yth.
(Daftar nama terlampir)
di
Jakarta

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk menghadiri Kegiatan Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi TA 2023 (*Unaudited*) dan Penyusunan Aplikasi SIVIKA dan E-kinerja (LAKIP) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis s.d. Sabtu / 1 s.d. 3 Februari 2024
Agenda : susunan acara terlampir
Tempat : Hotel Ibis Style Bogor Raya
Jl. Golf Estate Bogor Raya, Sukaraja
Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16710
Pakaian : Kamis menggunakan Batik
Jumat dan Sabtu menggunakan pakaian Bebas Rapih

Agar pelaksanaan rapat berjalan lancar, tertib dan mengarah pada pencapaian tujuan, diharapkan mempersiapkan bahan rapat dan hadir tepat waktu.

Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/Saudari kami ucapkan terima kasih.

**Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan**



Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP.196909091993031001
Digital Signature
mk924684650240130045002

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177
Email: Office@mkri.id

3. Materi

Materi terdapat pada link : bit.ly/LKMKUnaudited2023

Penyusunan LK TA 202...

[Download all](#)

Name ↑	Owner	Last mo... ▼	File size
 1. Susunan Acara Rapat Penyusunan ...	 Owner hidden	2:57 PM	354 KB
 2. Hasil Kegiatan Penyusunan Lapora...	 Owner hidden	8:14 PM	197 KB
 3. Progres Terakhir Penyusunan LK d...	 Owner hidden	8:14 PM	3.9 MB
 4. CALK TA 2023 - Unaudited.docx	 Owner hidden	8:16 PM	1.9 MB
 01022024 - Penyusunan LK LBP Mah...	 Owner hidden	3:00 PM	4.1 MB
 Materi Penyusunan Penyampaian LK ...	 Owner hidden	3:00 PM	4.6 MB
 Penatausahaan BMN 2023.pptx	 Owner hidden	3:00 PM	23.6 MB

4. Realisasi Anggaran

Keterangan	Jumlah
Biaya Honor Narasumber	Rp14.800.000,-
Biaya Paket Meeting Luar Kota	Rp110.130.000,-
Biaya Perjalanan Dinas	Rp73.318.805,-
Biaya Belanja Bahan	Rp45.566.505,-
Jumlah	Rp243.815.310,-

5. Dokumentasi





transparansi dan akuntabilitas Laporan Keuangan
dalam rangka mempertahankan predikat opini WTI

Bogor, 1 - 3 Februari 2024

